



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI LUH PUTU EKA SULISTIA DEWI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN I
3. NHK : 851061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 135.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.500.000

1. MOTOR, HONDA NF125D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
2. MOBIL, KIA CARENS SE MT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
43.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
4. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO 004 Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 213.977.959

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 424.477.959

III. HUTANG Rp. 147.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 277.477.959

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.